

CASCADING DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

DINAS PERTANAHAN

SEKRETARIAT	BIDANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	BIDANG PENANGANAN MASALAH TANAH DAN PENGAMANAN FISIK	PROGRAM 4
PROGRAM 1	PROGRAM 2	PROGRAM 3	PROGRAM 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Indikator program :	Indikator Program	Indikator program :	Indikator program :
1. Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 2. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 3. Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase sengketa tanah yang dimediasi	Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	1. Persentase Tanah Asset Pemerintah Kota yang di sertifikatkan 2. Persentase pengamanan fisik tanah pemerintah Kota

KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 3. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

STAKEHOLDER EKSTERNAL

BAPPEDA INSPEKTORAT BPKAD BAGIAN HUKUM	BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BUMN SWASTA	DINAS TATA RUANG DINAS KESEHATAN DINAS PERUMAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP SATPOL PP KEC/KEL DINAS PERDAGANGAN	MASYARAKAT
---	---	---	------------

